

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian skala nasional merupakan cara untuk membangkitkan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti dikemukakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu Pembangunan sebagai salah satu cermin Pancasila terutama dijiwai sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan waktu yang lama serta perbaikan beberapa aspek yang mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu aspek yang harus diperbaiki yaitu transportasi.

Transportasi adalah aspek yang berhubungan langsung dengan mobilitas orang maupun barang. Sulitnya mobilitas massa maupun barang dapat memperlambat proses perekonomian, seperti proses produksi, pendistribusian produk ekonomi masyarakat, lalu lintas massa dan sejenisnya. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus didukung dengan peningkatan sarana maupun prasarana transportasi yang baik. Transportasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari suatu tempat ke tempat lainnya yang disebut tempat tujuan. Karena Perjalanan mengangkut muatan dari tempat asal (origin) ke tempat tujuan (destination) disebut origin-destination travel. Suatu kondisi Barang dari tempat asal (misalnya beras dari tempat dari tempat produksi di pedesaan) dikirim ke tempat tujuan (yaitu pasar-pasar yang di perkotaan) memberikan guna (utility) yang lebih besar ke penduduk perkotaan yang membutuhkan beras untuk memenuhi konsumsi pangan sehari-hari dalam bentuk guna tempat (place utility) dengan berpindahnya tempat dari daerah produksi di pedesaan ke pasar-pasar di perkotaan. Dalam hal ini transportasi

biasanya berupa angkutan umum baik angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara.

Angkutan umum sendiri merupakan Angkutan massal pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Sementara Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara. (Warpani, 1990).

Angkutan umum penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Pengangkutan dibedakan tiga kategori yaitu angkutan antar kota, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Angkutan antar kota dibagi dua yaitu angkutan kota antar provinsi (AKAP) adalah pelayanan jasa angkutan umum antar kota yang melampaui batas administrasi provinsi, dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yaitu pelayanan jasa angkutan umum antar kota dalam satu wilayah administrasi provinsi. Angkutan umum itu sendiri terdiri atas angkutan umum perkotaan maupun angkutan umum pedesaan

Angkutan umum pedesaan adalah salah satu transportasi yang digunakan masyarakat pedesaan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berbagai daerah di pedesaan memiliki transportasi angkutan pedesaan termasuk di Kabupaten Jember. Pada umumnya Angkutan umum pedesaan di Kabupaten Jember dibagi menjadi dua yaitu angkutan pedesaan bermesin dan tidak bermesin. Angkutan pedesaan tidak bermesin merupakan angkutan pedesaan yang tidak menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak. Kendaraan ini tergantung pada tenaga manusia, hewan ataupun memanfaatkan keadaan alam di sekitarnya. Umumnya kendaraan tidak bermotor ini berupa becak, dokar atau cekar yang tidak bertenaga motor atau mesin. Angkutan pedesaan bermesin adalah angkutan pedesaan yang menggunakan mesin seperti angkutan pedesaan jenis colt. Pada perkembangannya, saat ini

angkutan pedesaan lebih condong pada kendaraan bermesin daripada tidak bermesin.

Perkembangan Angkutan umum pedesaan di Kabupaten Jember itu sendiri dari awal tahun 2000-an hingga tahun 2009 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan bisa dikatakan mati suri. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat serta laju perekonomian yang semakin canggih. Hal itu membuat Bu Faida selaku bupati Jember ingin mengaktifkan kembali angkutan umum pedesaan agar bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat pedesaan agar memudahkan mereka untuk berpergian ke kota. Sehingga bupati Jember mengeluarkan peraturan yang menjurus pada kinerja instansi yang dimaksud adalah Dinas Perhubungan mengenai angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Jember, diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Jember No.1.1 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember di lingkungan Kabupaten Jember, disebutkan bahwa uraian indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah tentang pemerataan angkutan pedesaan di Kabupaten Jember, yang tujuannya ialah untuk menghidupkan kembali angkutan pedesaan yang sempat mati suri karena armada di pedesaan yang tidak terurus, dimana pemerataan armada angkutan pedesaan dibawah naungan pihak ORGANDA dengan dinas perhubungan sebagai pihak penanggung jawabnya.

Untuk mengatasi kondisi dan mencari upaya pemecahan masalah tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Jember. Pada penelitian ini dilakukan peninjauan terhadap kebijakan pelayanan angkutan pedesaan yang meliputi implementasi, dampak, dan efektivitas kebijakan pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Jember sebagai suatu indikator keberhasilan pencapaian dalam implementasi kebijakan dengan diberlakukannya peraturan bupati yang masih tergolong baru tersebut.

Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan angkutan perlu dilakukan pengawasan pelayanan angkutan pedesaan dengan melaksanakan pengawasan dan diharapkan dapat mengetahui sejauh mana pelayanan Angkutan pedesaan selama kurun waktu setahun sejak diberlakukannya peraturan

bupati tersebut serta dapat mengetahui permasalahan operasional pelaksanaan angkutan Pedesaan di lapangan sehingga dapat memperbaiki pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas angkutan Pedesaan. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi dipenuhi maka kepuasan penumpang dapat tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan kajian penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Wilayah Kabupaten Jember. Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 1.1 Tahun 2018 disebutkan bahwa uraian indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah meningkatnya aksesibilitas transportasi udara dan darat dengan sasaran kinerja adalah jumlah frekuensi penerbangan yang beroperasi dan jumlah angkutan pedesaan yang terealisasi. Salah satu manfaat IKU yang tertera dalam peraturan Bupati Jember adalah evaluasi kinerja instansi pemerintah serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Namun fokus program yang diteliti adalah mengenai program angkutan pedesaan di Kabupaten Jember. Maka dari itu, apakah indikator kinerja tersebut sesuai pada target sasaran yang berpedoman pada indikator kinerja utama (IKU) atau tidak. Selain itu, juga melihat pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember rencana-rencana apa saja yang sudah dicapai oleh Dinas Perhubungan dan apakah pada penerapan rencana strategis dan program tersebut telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Jember (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, secara umum yang menjadi permasalahan adalah “Bagaimana Implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Jember dengan studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Jember dengan studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Perhubungan mengenai implementasi program Peningkatan Pelayanan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang kajian implementasi kebijakan khususnya bagaimana pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat kebijakan serta strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan saya dibidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mengenai penulisan skripsi dan bagaimana mempertahankannya dihadapan tim penguji.